BAB II

LANDASAN TEORI

A. Anggaran

Anggaran adalah sejumlah uang yang tersedia untuk membiayai kegiatan/program dalam periode tertentu. Anggaran dapat dibuat melalui proses penyusunan rancangan keuangan yaitu pemasukan dan pengeluaran, selanjutnya dana tersebut dialokasikan ke setiap kegiatan berdasarkan dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu.[14] Pembuatan anggaran sektor publik sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebuthan masyarakat, seperti listrik, air bersiih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak.[15] Dalam proses penyusunan anggaran sektor publik harus sesuai dengan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomer. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomer. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomer. 15/2004 tentang pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.[16] Ketiga perundang-undangan tersebut dapat membuat perubahan dalam penyelengaraan pemerintah serta

---

[14] Nurkholis dan Moh. Khusaini,*Penganggaran Sektor Publik,*(Malang: UB Press, 2019), hal. 4

[15] *Ibid,* hal. 5

[16] Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), hal. 164

pengaturan keuangan negara, khususnya dalam pembuatan rancangan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Anggaran sektor publik sangat penting adanya karena (1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (2) Anggaran diperlukan karena tidak terbatas dan terus berkembangnya kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. (3) Anggaran merupakan betuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan istrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.[17]

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:[18]

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

   Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merancang tujuan agar sesuai dengan visi dan misi yang ada di lembaga berkaitan, membuat rencana program/kegiatan yang akan dilakukan lembaga dengan maksud mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, memberikan dana untuk program atau kegiatan yang telah disusun.

[17]Nurkholis dan Moh. Khusaini,*Penganggaran Sektor Publik*,..., hal. 6
[18] *Ibid*

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan peringatan yang dapat mengendalikan peneriman dan pengeluaran oleh lembaga agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publi, dengan ini maka akan miminimalisir terjadi penggunaan uang negara secara berlebihan.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Untuk menstabilkan roda perekonomian serta menunjang pertumbuhan ekonomi pemerintah menggunakan anggaran sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah.

4. Anggaran sebagai alat politik

Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran akan membuat jatuhnya nilai pemerintah dimasyarakat serta dapat menghilangkan kekuasaan politik yang sebelumnya telah dipegang.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan Komunikasi

Sebagai alat koordinasi dan komunikasi anggaran membuat seluruh bagian dari bagian terbawah hingga teratas dalam pemerintah harus melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai pelaksanaan program/kegiatan yang terdapat didalam anggaran.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Pelaksanaan anggaran oleh lembaga eksekutif akan dinilai oleh lembaga legislatif apakah pelaksanaan berjalan dengan baik atau tidak.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran yang dibuat harusnya dapat menantang atau memiliki tuntutan agar dapat memberikan motivasi kepada penggunanya bekerja secara baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan dan tuntutan itu sendiri juga harus dalam hal wajar yang artinya dapat dicapai dan dijalankan oleh pengguna anggaran.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan keuangan publik yang dikelola langsung oleh pemerintah. Setiap tahunnya APBN ditetapkan dengan undang-undang, dan barang milik negara yakni harga tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan. Penyusunan APBN harus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana negara yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah. Kemudian APBN harus mendapat persetujuan dari DPR, apabila ternyata RAPBN ditolak oleh DPR maka pemerintah menggunaka anggaran tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdari dari:[19]

1. Anggaran Pendapatan Negara merupakan suatu taksiran tentang makmisal penerimaan. Keuangan publik sebagai sumber pendapatan negara dan merupakan dana yang akan diterima guna membiayai belanja negara atau pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

[19] Tjahjanulin Domai, *Manajamen Keuangan Publik...*, hal. 41

penambah nilai kekayaan bersih (penerimaan pajak dan bukan pajak, hibah)

2. Anggaran Belanja Negara merupakan suatu taksiran tentang batas pengeluaran tertinggi keuangan publik, bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah untuk masa satu tahun, atau belanja negara adakah kewajiban pemerintah pusat yang diakui dengan pengurang nilai kekayaan bersih (belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dan belanja negara, belanja modal).

APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

1. Fungsi otorisasi APBN adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melakukan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan APBN adalah untuk merencanakan kegiatan di tahun APBN tersebut, dimana manajemen berpedoman pada anggaran negara dalam pelaksanaanya.
3. Fungsi pengawasan APBN adalah anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaran pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Funsi alokasi APBN adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi APBN adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi APBN adalah anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupanyakan keseimbangan fundamental perekonomian.[20]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.[21] Pendapatan Negara adalah penerimaan kas negara oleh pemerintah yang akan menambah nilai dana yang terdapat dipemerintah pusat. Yang termasuk pendapatan negara yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Belanja negara merupakan kegiatan pengeluaran kas negara untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Pengeluaran kas negara tersebut digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah. Pembiayaan adalah penerimaan dan pengeluaran negara secara keseluruhan yang perluh dibayar atau akan diterima kembali.

Pelaksanaan APBN tidak semata-mata hanya dilaksanakan begitu saja namun setiap penggunaan uang negara harus ada pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban peneglolaaan keuangan negara berupa laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus diperiksa dulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian disampaikan kepada DPR.

---

[20] Tjahjanulin Domai, *Manajamen Keuangan Publik...*, hal. 98-99
[21] *Ibid*, hal. 103

C. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kementerian Negara/lembaga. Dokumen tersebut harus mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku BUN.

Tindakan yang berhubungan dengan keuangan negara yaitu pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN harus berdasarkan DIPA yang telah dibuat dan disahkan, selain itu dokumen kegiatan akuntansi pemerintah lainnya juga harus diperhatikan. Tanpa DIPA ini, anggaran yang diminta oleh Kementerian/Lembaga tidak akan cair. Dan ini tentunya untuk menghindari korupsi serta ada pengawasannya. Jadi, DIPA bisa dijadikan alat pengendalian, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus perangkat akuntansi pemerintah[22]

DIPA di bagi menjadi dua yaitu DIPA Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (DIPA BA K/L) dan DIPA Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (DIPA BA BUN). Isi dari DIPA sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu DIPA Induk dan DIPA petikan. DIPA Induk adalah kumpulan dari DIPA per Satker yang dijadikan satu dan disusun oleh Pengguna Anggaran. sedangkan DIPA Petikkan merupakan DIPA yang dicetak secara otomatis dan digunakan untuk pedoman pedoman pelaksanaan kegiatan, DIPA ini

[22] Zeembry, dkk, *212 Tips Mastering Professional Web Design,* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hal. 196

merupakan DIPA yang dibuat per Satker dan berkaitan dengan DIPA Induk. Sebelum dibuatnya DIPA satker harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang mencakup informasi lengkap mengenai anggaran pada tahun berjalan. Selanjutnya Kementerian Negara/Lembaga menyusun DIPA bersadarkan RKA-KL yang telah ditetapkan. DIPA harus disahkan oleh Menteri Keuangan, namun DIPA dapat juga direvisi. Adapun alasan-alasan DIPA dapat direvisi:[23]

1. Alasan Administratif

   Revisi DIPA karena alasan administratif meliputi perubahan sebagai akibat dari kesalahan administrasi; dan/atau perubahan rumusan yang tidak sesuai dengan anggaran.

2. Alasan Alokatif

   Revisi DIPA karena alasan alokatif meliputi penambahan/pengurangan alokasi pagu anggaran; dan/atau perubahan atau pergeseran rincian pagu anggaran. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus

3. Revisi DIPA karena perubahan rencana penarikan dana dilakukan untuk menyesuaikan dengan realisasi belanja dan perubahan rencana Kegiatan.

4. Revisi DIPA karena perubahan rencana penerimaan dana dilakukan untuk menyesuikan dengan realisasi Penerimaan Negara dan perubahan target Penerimaan Negara.

[23] Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 38

Proses penyelesaian revis DIPA dilakukan oleh KPA DIPA. Dokumen revisi DIPA dan data/dokumen pendukung lainnya disampaikan KPA kepada Kanwil DJPB untuk persetujuan. Jika kanwil DJPB menerima usulan revisi DIPA maka akan menginput ADK RKA-KL DIPA ke server, namun jika usulan revisi DIPA ditolak maka Kanwil DJPB akan menerbitkan surat penolakan revisi DIPA.

D. Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan rancangan anggaran yang telah dibuat. Dapat dikatakan juga pencairan dana ada proses menguangkan anggaran atau mengambil uang yang disediakan untuk pendanaan suatu kegiatan. Pencairan dana dengan menerbitkan SP2D adalah proses pemindahan dana dari kas negara ke rekening satker. Sebelum diterbitkannya SP2D harus ada Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibedakan menjadi empat sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), Surat Perintah Membayar Uangan Persediaan (SPM-TU), serta Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).[24] Pencairan UP sendiri harus berkisar antara 50%-100% dari UP yang tersedia untuk dicairkan. Jika ternyata permintaan pencairan UP kurang dari 50% atau lebih dari nilai UP maka pencairan dan UP tidak bisa dilakukan atau tidak diproses oleh pihak KPPN.

[24] Nurkholis, *Penganggaran Sektor Publik*, (Malang: UB Press, 2019), hal. 65

E. Mekanisme Pencairan Dana APBN

Mekanisme pencairan dana tidak lepas dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN adapun pengertian dari 3 surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pembayaran (SPP)

   Merupakan dokumen permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPP sendiri diterbitkan oleh Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). SPP terdiri dari dokumen asli kontrak, kuintansi yang diisi dengan nilai pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.[25]

2. Surat Perintah Membayar (SPM)

   Merupakan dokumen untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.[26] Penerbitan SPM dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). SPM sendiri dinyatakan sah jika terdapat tandatangan dari PPSPM.

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

   Merupakan surat yang digunakan untuk mencairkan dana atas beban APBN sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM).[27] Surat ini diterbitkan oleh KPPN selaku Bendahara Umum Negara.

---

[25] Deddi Nordiawan,dkk , *Akuntansi Pemerintahan*,(Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 85

[26] *Ibid*

[27] Deddi Nordiawan,dkk , *Akuntansi Pemerintahan...*, hal.85

Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP). Setelah SPP jadi selanjutnya harus segera disampaikan kepada PA/Kuasa PA agar dapat disampaikan kepada Penjabat Penerbit Surat Perintah Membayar. Kemudian Petugas penerima SPP akan menyampaikan SPP tersebut kepada Pejabat Penguji SPP untuk dilakukan pengujian SPP. Setelah SPP diuji maka akan diterbitkan SPM untuk disampaikan KPA kepada kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).[28] SPM sendiri dikatakan sah apabila terdapat tandatangan pejabat yang diberi kewenangan.

PA/Kuasa PA menyerahkan Surat Perintah Membayar di loket penerimaan SPM yang ada di KPPN, yang kemudian akan diserahkan oleh petugas kepada Seksi Pencairan Dana setelah semua berkas lengkap. SPM tersebut akan diuji oleh petugas, pengujian SPM ini berupa pengujian subtandi dan pengujian formal. Setelah dilakukan pengujian maka terdapat dua kemungkinan, yaitu SPM ditolak dan SPM diterima. Jika SPM ternyata ditolak maka Seksi Pencairan Dana tidak menerbitkan atau menolak menerbitkan SP2D. Sedangkan jika SPM diterima maka Seksi Pencairan Dana akan menerbitkan SP2D.[29] SP2D harus ditandatangani oleh Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank. Tapi sejak diberlakukannya OM SPAN SP2D tidak lagi dicetak dan ditandan tangani secara fisik. Namun, pada awal tahun 2014

---

[28] Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 10:33 WIB.

[29] Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016, diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pada pukul 10:52 WIB.

pertama kali OM SPAN digunakan pencetakan SP2D masih dilakukan sehingga mengharuskan satker bolak balik ke KPPN, namun seiring dengan berjalannya waktu hal tersebut dirasa tidak efisien dan membuang waktu SP2D tidak lagi dicetak melainkan diuploud di aplikasi OM SPAN. Dengan OM SPAN SP2D hanya perluh diterbitkan diaplikasi OM SPAN dan satker dapat memantau/memonitoring melalui aplikasi. Di aplikasi SPAN satker dapat melihat apakah SPM disetujui atau tidak dan apakah SP2D telah terbit atau belum.

F. Penyerapan Dana APBN

Penyerapan APBN sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penyerapan anggaran sendiri masih mengalami keterlambatan yang menjadi masalah secara terus-menerus tiap tahunnya. Lambatnya penyerapan anggaran ini tentunya akan berdampak pada penyelesaian progaram dan kegiatan pemerintah. Manfaat belanja dapat hilang karena target penyerapan anggaran tidak tercapai, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang menganggur.[30] Penyerapan APBN seharusnya terjadi secara merata agar tidak mengalami penumpukan pencairan di akhir tahun yang akan menyebabkan terlambatnya penyerapan anggaran. Pada awal tahun semestinya Kementerian Negara/Lembaga sudah menyerap sebagian anggaranya agar stimulus finansial

[30] Mulyono, *Berprestasi Melalui JFP AYo Kumpulkan Angka Kreditmu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.74

sudah dirasakan awal tahun. Sebenarnya dalam DIPA juga sudah dicantumkan perkiraan pencairan dana seharusnya satker menggunakan anggarannya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat agar tidak terjadi penumpukan pencairan dana di akhir tahun.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas penelitian ini diperlukan penelitian terdahulu sebagai acuan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan mengenai analisis faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran:

Penelitian Miliasih[31] tentanag analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satuan kerja kementerian negara/lembaga TA 2010 di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganaliss tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti menyimpulkan terdaji keterlambatan penyerapan anggaran belaja pada sakter sebanyak 75.25%. permasalahan pada internal satker menjadi penyebab utama dalam keterlambatan ini. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu meneliti tentang keterlambatan penyerapan anggaran belanja.

[31] Retno Miliasih, Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 Di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pada pukul 20:09 WIB.

Sedangkan perbedaannya adalah pada variabel yang digunakan, peneliti memperbanyak variabel penelitian yang akan diteliti.

Penelitian Widianingrum dkk[32] tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran satuan kerja perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Situbondo. Penelitian ini memilik tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Peneliti menggunakan analisis faktor eksploratori dalam melakukan analisis data. Penelitian ini menghasilkan enam faktor, yaitu: faktor perencanaan, faktor pengadaan barang/jasa, faktor regulasi, faktor internal, faktor administrasi , faktor sumber daya manusia. Keenam faktor tersbut ynag mempengaruhii penyerapan anggaran belanja. di pemerintah Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah dalam penelitian adalah variabel faktor mutasi pejabat yang di penelitian ini tidak ada dan akan di analisis oleh peneliti di penelitian sekarang.

Penelitian Anfujatin[33] tentang analisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang

---

[32] Desika Widianingrum,dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pada pukul 21:34 WIB.

[33] Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016, diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pada pukul 20:43 WIB.

menyebabkan penyerapan anggaran di Kabupaten Tuban pada triwulan III tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab minimnya penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Tuban triwulan III tahun 2015 adalah faktor Sumber Daya Manusia. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat, PPK/PPTK melakukan rangkap tugas dalam kegiatan pengadaan barang jasa, kurangnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan, ketiga hal tersebut menjadi faktor utama dalam Sumber Daya Manusia. Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran belanja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah variabel faktor mutasi pejabat, faktor regulasi, dan faktor internal yang di penelitian ini tidak ada dan akan di analisis oleh peneliti di penelitian sekarang.

Penelitian Zaenudinsyah[34] mengenai analisis faktor penyebab penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan 8 faktor yaitu administasi perbendaharaa , pelaksanaan pengadaan, perencanaan anggaran, persyaratan teknis pendukung, jadwal pengadaan, sumber daya manusia, kompensasi, dan mutasi jabatan sehingga menyebabkan penumpukan pencaiaran dana APBN

[34] Fandi Zaenudinsyah, Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada Akhir Tahun Anggaran, *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakan publik* Vol. 1, No. 1 2016, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pada pukul 17:12 WIB.

pada akhir tahun anggaran pada Satuan Kerja lingkup KPPN Jakarta V. persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti faktor faktor penyebab penumpukan pencairan dana APBN. Sedangkan perbedaannnya adalah variabel faktor regulasi, dan faktor internal yang di penelitian ini tidak ada dan akan di analisis oleh peneliti di penelitian sekarang.

Penelitian Priatno[35] mengenai analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor dan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan faktor pengadaan barang dan jasa serta faktor perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang faktor yang mempenngaruhi penyerapan anggaran serta tempat penelitian yang sama. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel faktor penyedia barang dan jasa, faktor mutasi pejabat, faktor regulasi, dan faktor internal yang di penelitian ini tidak ada dan akan di analisis oleh peneliti di penelitian sekarang.

Penelitian Desmaini[36] mengenai analisis faktor-faktor penyebab penumpukan pencairan dana belanja modal pada akhir tahun di pemerintah daerah Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan

---

[35] Prasetyo Adi Priatno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bliar, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pada pukul 19:09 WIB.

[36] Desmaini, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana Belanja Modal Pada Akhir Tahun Di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, (Padang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 14:53 WIB.

pencairan dana belanja modal pada akhir tahun di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan faktor utama penyebab penumpukan adallah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, dokumen pencairan dana, dan regulasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang penumpukan pencairan dana diakhir tahun anggaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada dana anggaran yang diteliti, pada penelitian ini meneliti dana pemerintah daerah (APBD) sedangkan penelitian sekarang meneliti dana APBN.

Penelitian Zulaikah dan Burhany[37] mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV di Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor-faktor yang terdiri atas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan pengadaan barang/jasa terhadap penumpukan penyerapan anggaran Triwulan IW di Kota Cimahi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan pengadaan barang/jasa berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penumpukan penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penumpukan anggaran pada akhir tahun anggaran. Sedangkan perbedaannya

[37] Binti Zulaikah dan Dian Imanina Burhany, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan IV Di Kota Cimahi, *Industrial Research Workshop and National Seminar*, diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 15:29 WIB.

adalah penelitian ini meneliti dana pemerintah daerah (APBD) sedangkan penelitian sekarang meneliti dana APBN.

Penelitian Hasni[38] mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor perencanaan anggaran, faktor pengadaan, sumber daya manusia (SDM), dan regulasi terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor perencanaan, pengadaan, sumber daya manusia, dan regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Batang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang faktor yang mempengaruhi penumpukan anggaran pada akhir tahun anggaran. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini meneliti dana pemerintah daerah (APBD) sedangkan penelitian sekarang meneliti dana APBN.

Penelitian Febrianti[39] mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran proyek pada badan pengembangan wilayah suramadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran proyek pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

---

[38] Nanik Tsania Hasni, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, *Telaah Manajemen* Vol. 13 Edisis 1 2016, diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 15:41 WIB.

[39] Diana Febrianti, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Anggaran Proyek Pada Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, (Surabaya: Tesis Tidak Diterbitkan, 2015), diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 16:17 WIB.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan indikator penyebabnya adalah faktor koordinasi, faktor pengelolaan, faktor pengendalian, dan faktor pemilihan staff. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang anggaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada dana anggaran yang diteliti, pada penelitian ini meneliti anggaran proyek sedangkan penelitian sekarang meneliti dana APBN.

Penelitian Putri[40] mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dokumen perencanaan, pencatatan administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan terhadap penyerapan anggaran pada SKPD pemerintah Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran sedangkan dokumen perencanaan dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah meneliti tentang penggunaan anggaran pemerintah. Sedangkan perbedaannya adalah

[40] Carlin Tasya Putri, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Provinsi Bengkulu, (Bengkulu: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), diakses pada tanggal 12 Desember 2019 pada pukul 16:45 WIB.

penelitian ini meneliti dana pemerintah daerah (APBD) sedangkan penelitian sekarang meneliti dana APBN

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

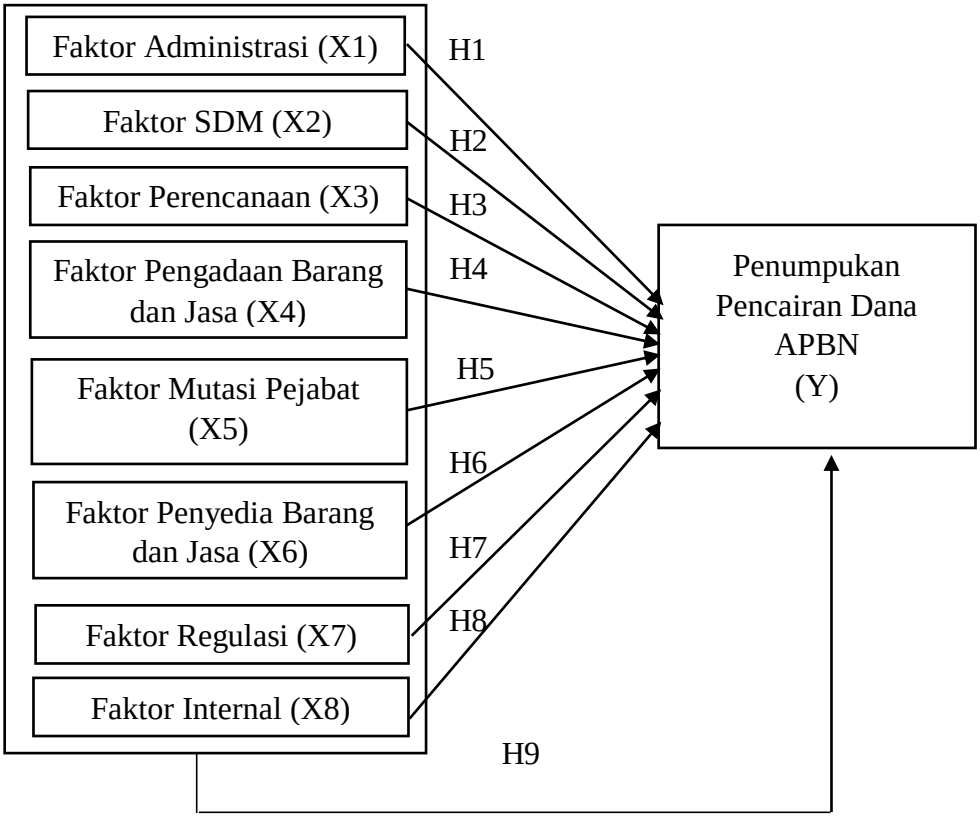

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2019

Variabel bebas (X) adalah faktor-faktor penyebab yang terdiri dari Faktor Administrasi (X1), Faktor SDM (X2), Faktor Perencanaan (X3), Faktor Pengadaan Barang dan Jasa (X4), Faktor Mutasi Pejabat (X5), Faktor Penyedia Barang dan Jasa (X6), Faktor Regulasi (X7), dan Faktor Internal (X8) sedangkan variabel terikat Y adalah penumpukan pencairan dana APBN di

akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

Keterangan:

H1 : Pengaruh variabel faktor administrasi (X1) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desika Widianingrum.[41]

H2 : Pengaruh variabel faktor SDM (X2) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fandi Zaenudinsyah.[42]

H3 : Pengaruh variabel faktor perencanaan (X3) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo Adi Priatno.[43]

H4 : Pengaruh variabel faktor pengadaan barang dan jasa (X4) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada

---

[41] Desika Widianingrum,dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017

[42] Fandi Zaenudinsyah, Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada Akhir Tahun Anggaran, *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakn publik* Vol. 1, No. 1 2016.

[43] Prasetyo Adi Priatno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo Adi Priatno.[44]

H5 : Pengaruh variabel mutasi pejabat (X5) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fandi Zaenudinsyah.[45]

H6 : Pengaruh variabel faktor penyedia barang dan jasa (X6) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anfujatin.[46]

H7 : Pengaruh variabel faktor regulasi (X7) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desika Widianingrum.[47]

---

[44] Prasetyo Adi Priatno, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Bliar, (Malang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013)

[45] Fandi Zaenudinsyah, Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada Akhir Tahun Anggaran, *Jurnal Perbendaharaan, keuangan negara dan kebijakn publik* Vol. 1, No. 1 2016.

[46] Anfujatin, Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 14, No. 1 2016.

[47] Desika Widianingrum,dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017

H8 : Pengaruh variabel faktor internal (X8) terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar dikembangkan dari landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desika Widianingrum.[48]

H9 : Pengaruh variabel faktor administrasi (X1), faktor SDM (X2), faktor perencanaan (X3), faktor pengadaan barang dan jasa (X4), faktor mutasi pejabat (X5), faktor penyedia barang dan jasa (X6), faktor regulasi (X7), dan faktor internal (X8) secara bersama-sama terhadap variabel penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

I. Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah asumsi atau jawaban sementara dari peneliti tentang variabel-variabel yang sedang diteliti. Adapun hipotesis yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor Administrasi terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

   Administrasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelenggaraan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan. Dari pengertian tersebut sudah dapat dilihat bahwa administrasi menjadi bagian

[48] Desika Widianingrum,dkk, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 11, No. 2 2017

dari sistem pemerintah. Proses administrasi yang baik maka dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga, peneliti akan menguji faktor administrasi pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Administrasi berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

2. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan dipemerintah. Hal itu dapat dilihat dari profesional tidaknya manusia sebagai tenaga kerja, yang tentunya akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan. Sehingga peneliti akan menguji faktor sumber daya manusia pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

3. Faktor Perencanaan terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Perencanaan merupakan proses pembuatan rencana keuangan negara. Perencanaan sendiri tidak lepas dari pencapain tujuan oleh karena itu dalam perencanaan harus difikirkan secara baik-baik. Sehingga peneliti

akan menguji faktor perencanaa pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Perencanaan berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

4. Faktor Pengadaan Barang dan Jasa terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan kegiatan akan berkaitan dengan terlaksananya kegiatan. Pengadaan barang dan jasa sendiri mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional. Sehingga peneliti akan menguji faktor pengadaan barang dan jasa pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

5. Faktor Mutasi Pejabat terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Metusi pejabat adalah perubahan yang terjadi secara mendadak pada struktur organisasi, hal tersebut disebabkan karena ada pemindahan pegawai. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan kegiatan. Sehingga peneliti akan menguji faktor mutasi pegawai pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Mutasi Pejabat berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

6. Faktor Penyedia Barang dan Jasa terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Penyedia barang dan jasa adalah suatu badan usaha atau individu yang telah menandatangi kontrak dan bersedia untuk menyediakan barang dan jasa yang diperluhkan. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Sehingga peneliti akan menguji faktor sumber daya manusia pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Penyedia Barang dan Jasa berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

7. Faktor Regulasi terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

Regulasi yang dimaksud adalah peraturan yang ada dalam proses kegiatan. Tentunya regulasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Sehingga peneliti akan menguji faktor regulasi pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H1 : Faktor Regulasi berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

8. Faktor Internal terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran

   Internal organisasi haruslah berjalan sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan bersama. Sehingga peneliti akan menguji faktor internal pada penelitian ini, adapun hipotesisnya sebagai berikut:

   H1 : Faktor Internal berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran pada satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Blitar.

9. Faktor Administrasi, Faktor SDM, Faktor Perencanaan, Faktor Pengadaan Barang dan Jasa, Faktor Mutasi Pejabat, Faktor Penyedia Barang dan Jasa, Faktor Regulasi, Faktor Internal secara bersamaan terhadap penumpukan pencairan anggaran APBN di akhir tahun anggaran.

   H1 : Faktor Administrasi, Faktor SDM, Faktor Perencanaan, Faktor Pengadaan Barang dan Jasa, Faktor Mutasi Pejabat, Faktor Penyedia Barang dan Jasa, Faktor Regulasi, Faktor Internal secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.